

## PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Ayu Mirah Amelia Amyartha  
ayumirah.12113@gmail.com  
Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of good corporate governance and political connections on tax avoidance. The independent variables used in this study are institutional ownership, audit committee, independent board of commissioners and political connections. While the dependent variable used is tax avoidance. The population used in this study are manufacturing companies in the food and beverage sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017 – 2020. This study uses a quantitative type of research and sampling using purposive sampling technique, with a population of 30 companies and 15 company samples obtained. This study uses multiple linear analysis method, data analysis using classical assumptions include normality test, multicollinearity test, autocorrelation test and heteroscedasticity test. The results of this study indicate that institutional ownership has a positive effect on tax avoidance. The audit committee has no effect on tax avoidance, because the proportion of the audit committee has no effect on the implementation of tax avoidance. The Board of Commissioners has a negative effect and political connections have no effect on tax avoidance, because companies with political connections are considered as taxpayers with low risk, so they do not have the potential to avoid tax.*

*Keywords: good corporate governance, tax avoidance, political connections*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen dan koneksi politik. Sementara variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yang populasinya terdapat 30 perusahaan dan diperoleh 15 sampel perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda, analisis data menggunakan asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena proporsi komite audit tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan *tax avoidance*. Dewan Komisaris berpengaruh negatif dan Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang memiliki koneksi politik dianggap sebagai wajib pajak dengan risiko rendah, sehingga tidak berpotensi melakukan penghindaran pajak.

Kata Kunci: *good corporate governance, tax avoidance, koneksi politik*

### PENDAHULUAN

Pendapatan di dalam suatu negara menjadi indikator penting bagi negara untuk dapat menjalankan kegiatan perekonomian. Di Indonesia, pendapatan Indonesia berasal dari pajak yang dapat berfungsi untuk menjalankan kegiatan perekonomian. Iuran yang harus dibayar oleh masyarakat ke negara yang bersifat memaksa merupakan pengertian pajak (Mardiasmo, 2016). Bagi wajib pajak badan atau orang pribadi memiliki kewajiban perpajakan berdasarkan dengan peraturan undang - undang yang ada. Di Indonesia, pelaksanaan kewajiban

perpajakan menganut *self assessment system*, artinya wajib pajak memperoleh kewenangan untuk menghitung, membayar serta melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Kebijakan tersebut justru akan memberikan risiko tersendiri bagi negara, karena wajib pajak cenderung mengusahakan untuk melakukan penyetoran pajak seminimal mungkin. *Good corporate governance* ialah suatu dasar bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha, karena fungsi dari *Good Corporate Governance* tertuju bagi setiap lapisan organisasi di perusahaan. Contohnya dari segi transparansi, membuat manajemen menampilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Menurut penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara komite audit dan kualitas audit terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Mulyani *et al.*, (2018) variabel kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara kualitas audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Purwanti dan Sugiyarti (2017), koneksi politik adalah adanya hubungan yang terdapat kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya di lingkungan politik, yang berfungsi untuk mendapatkan benefit untuk kedua pihak. Penelitian milik Fajri (2018) menyimpulkan jika koneksi politik terdapat pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Melalui penelitian Murniyana (2018) menyimpulkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dalam penelitian ini dijelaskan jika perusahaan yang terdapat koneksi politik dengan pemerintah cenderung dipercaya oleh pemerintah, sehingga perusahaan dianggap tidak akan melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 - 2020 sebagai objek penelitian. Perusahaan manufaktur dipilih menjadi objek penelitian karena melaenjadi penyumbang pemasukan pajak terbesar di tahun 2020. Sesuai latar belakang di atas maka pengambilan judul dalam penelitian ini adalah "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur" dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah terkait penelitian ini adalah apakah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan koneksi politik berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Keagenan

Teori Keagenan menurut Ramadona (2016) ialah teori tentang kesejalaran antar anggota di perusahaan. Dalam teori ini dijelaskan tentang jenis - jenis biaya serta hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok yang dimaksud adalah hubungan antara *principal* dan *agent*. Pemilik saham disebut dengan *principal*, sementara manajer disebut juga sebagai *agent* yang menjalankan fungsi manajemen dalam perusahaan. *Principal* menggunakan *agent* untuk bekerja dan menjalankan tugas yang diberikan oleh *principal*.

### *Good Corporate Governance*

Menurut Claessens (2006) *Good corporate governance* dibagi menjadi dua kategori, yaitu perilaku kinerja perusahaan diukur dengan pertumbuhan, struktur pembiayaan dan perilaku bagi para pemegang saham. Kategori kedua adalah perilaku perusahaan dipengaruhi oleh sistem hukum, pasar keuangan dan sebagainya. Sementara dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/M-MBU/2002 tentang penerapan *good corporate governance* di Lingkungan BUMN, *good corporate governance* merupakan keberhasilan usaha yang dapat dilakukan dengan akuntabilitas, yang berfungsi untuk mendapatkan keberhasilan usaha dan

menciptakan nilai investor untuk waktu yang lama serta melihat kepentingan *stakeholder* lainnya dengan menganut peraturan undang - undang dan nilai - nilai etika.

**Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional ialah suatu kepemilikan saham bagi suatu institusi. Pihak yang memiliki bagian saham merupakan pihak yang memiliki kuasa penting dalam memberikan keputusan keuangan perusahaan. Selain itu kepemilikan institusional yang tinggi akan membuat para investor lebih mengawasi perusahaan demi menghindari kesalahan - kesalahan yang akan merugikan perusahaan dan investor. Menurut Nabela (2012) proporsi saham oleh institusi yang pengukurannya dilakukan dengan menggunakan presentase adalah pengertian dari kepemilikan institusi.

**Tax Avoidance**

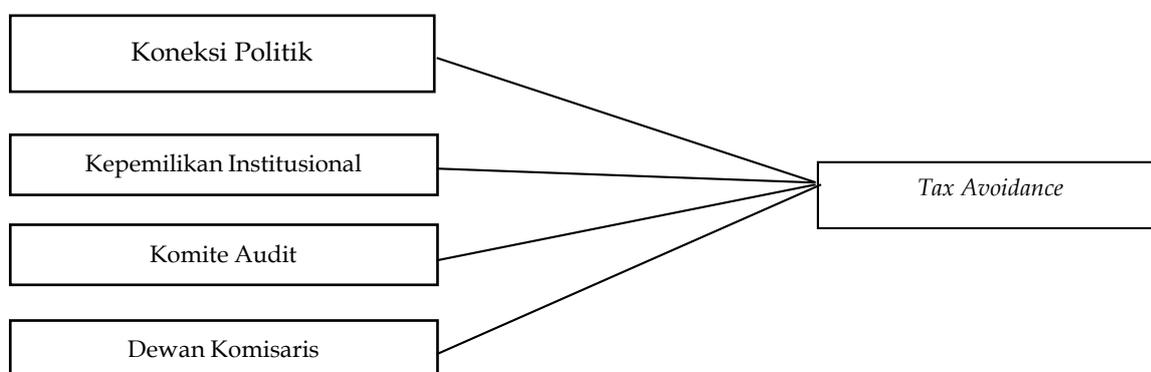
Kontribusi wajib oleh masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa yang berfungsi untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat merupakan pengertian dari pajak. Pajak digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran negara dan membiayai pembangunan berkelanjutan. Bagi perusahaan, pajak menjadi beban yang cukup besar sehingga mengakibatkan berkurangnya laba mereka. Sebagian perusahaan menerapkan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak sehingga mereka memperoleh keuntungan sesuai yang diharapkan.

**Koneksi Politik**

Pengertian politik menurut Walfarianto (2014) adalah sebuah rangkaian cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Koneksi politik berkaitan dengan kemudahan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan agar dapat dipermudah tujuannya. Bagi perusahaan yang terdapat koneksi politik umumnya memiliki kemudahan dalam akses informasi pemerintahan termasuk melakukan praktik penghindaran pajak. Pengertian koneksi politik menurut Cheng dalam Safii *et al.*, (2019) dijelaskan bahwa koneksi politik merupakan kemudahan yang dimiliki oleh perusahaan dalam aktivitas yang berhubungan dengan pemerintahan.

**Rerangka Pemikiran**

Berdasarkan teori dan penjelasan singkat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rerangka konseptual di penelitian ini yaitu:



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham sebuah perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Para pemegang saham mempunyai peranan penting terhadap proses pengambilan keputusan di perusahaan, karena hasil dari keputusan tersebut tentu akan berdampak bagi para pemegang saham. Menurut hasil penelitian Mulyani *et al.*, (2018) menyebutkan jika kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hal itu berkaitan dengan para pemegang saham yang ingin memaksimalkan laba dan nilai perusahaan, sehingga para *stakeholder* berusaha untuk menghindari hal - hal yang berisiko merugikan para pemegang saham yaitu dengan menghindari tindakan *tax avoidance*. Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam kedisiplinan manajer. Sehingga manajer tidak melakukan tindakan yang mementingkan diri sendiri, namun juga dapat mengambil keputusan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para pemegang saham sehingga memungkinkan terjadinya praktik *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis:

H<sub>1</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Komite audit bertanggung jawab saat melakukan kontrol bagi berjalannya suatu usaha, apakah perusahaan telah melaksanakan kegiatan usahanya dengan mengikuti peraturan yang ada. Sehingga keberadaan komite audit juga dapat membantu menghindari tindakan *tax avoidance*. Dalam penelitian Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena dengan adanya komite audit dalam perusahaan akan membuat *good corporate governance* diterapkan dengan baik. Sehingga praktik *tax avoidance* dapat dihindari. Sementara hasil penelitian Lestari dan Putri (2017) juga menyampaikan jika komite audit berpengaruh negatif pada pelaksanaan *tax avoidance*. Karena semakin banyak proporsi komite audit, maka kontrol pada kinerja laporan keuangan dapat dikendalikan dengan baik sehingga meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang diterapkan oleh manajemen. Berdasarkan penjelasan di atas maka kesimpulan hipotesis:

H<sub>2</sub> : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance***

Dewan Komisaris Independen adalah orang yang tidak terafiliasi dengan direksi atau pemegang saham pada suatu perusahaan. Hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyebutkan bahwa jumlah Dewan Komisaris Independen tidak ada pengaruh terhadap pelaksanaan *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian menurut Feranika (2014) menyampaikan jika semakin banyak komposisi dewan komisaris independen maka praktik *tax avoidance* semakin rendah bahkan dapat dihindari, karena tingginya pengawasan dari dewan komisaris independen. Menurut penjelasan itu, maka dapat disimpulkan hipotesis:

H<sub>3</sub> : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

### **Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance***

Koneksi politik ialah kedekatan pihak perusahaan dengan pemerintah, yang hubungannya dapat memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Hasil penelitian Fajri (2018) menyatakan jika koneksi politik berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*, semakin tinggi ikatan antara perusahaan dan pemerintah maka semakin tinggi juga penghindaran pajak yang diaplikasikan perusahaan. Hasil penelitian Maidina dan Wati (2020) menyebutkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada perusahaan yang diteliti terdapat orang - orang yang pernah menjabat dalam pemerintahan,

sehingga berpotensi tinggi untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan disimpulkan hipotesis:

H<sub>4</sub> : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:14) bahwa penelitian sebuah sampel yang terdapat dalam suatu populasi ialah pengertian dari metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2020.

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2009:14) *purposive sampling* ialah pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Pada penelitian ini maka kriteria sampel yang digunakan adalah: (1) Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2020. (2) Perusahaan yang memiliki data dan informasi keuangan yang lengkap berdasarkan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu tahun 2017 - 2020. (3) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2017 - 2020

### Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Data sekunder ialah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak terkait, data diperoleh lewat media perantara. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa angka - angka atau keterangan yang kemudian dianalisis dan diuji untuk mendapatkan kesimpulan. Dokumentasi dari sampel laporan keuangan tahunan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menggunakan laporan keuangan di perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2020.

### Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel digolongkan menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan ialah *tax avoidance*. Sementara variabel independent yang digunakan adalah *good corporate governance* dan koneksi politik, dijelaskan lebih rinci dengan menggunakan definisi operasional variabel untuk mempermudah pemahaman variabel.

### Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini ialah *tax avoidance*. Dalam melakukan kegiatan usaha, perusahaan selalu mengusahakan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin. Terdapat cara yang digunakan untuk mengurangi beban pajak yang terhutang sehingga perusahaan tetap memperoleh laba sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu dengan menerapkan praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* dilakukan dengan opsi yang legal dan dilakukan dalam bingkai peraturan perpajakan. Pada penelitian ini *tax avoidance* dihitung dengan *Cash Effective Tax Rate* atau CETR. CETR merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk membayar pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Semakin besar CETR maka mengindikasikan rendahnya tingkat penghindaran pajak. Dalam penelitian Mahanani dan Titisari (2017:115) CETR dihitung dengan:

$$\text{Cash effective tax rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *good corporate governance* serta koneksi politik. Dalam penelitian ini *good corporate governance* menggunakan kepemilikan institusional, komite audit serta dewan komisaris independen.

### Kepemilikan institusional

Kepemilikan saham oleh suatu institusi. Pihak yang memiliki bagian saham ialah pihak yang memiliki kuasa penting dalam memberikan keputusan keuangan perusahaan. Menurut Fiandri dan Muid (2017:5) kepemilikan institusional diukur dengan:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}}$$

### Komite Audit

Komite yang bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris Independen untuk memastikan asas - asas GCG telah diterapkan dengan baik. Berdasarkan penelitian Eksandy (2017) komite audit diukur dengan variabel *dummy* dimana nilai 0 (nol) menyatakan jika komite audit < tiga orang, sementara bernilai 1 (satu) bila total komite audit paling sedikit 3 orang.

### Dewan Komisaris independen

Orang yang tidak memiliki hubungan kerjasama dengan direksi atau dewan komisaris. Dewan Komisaris Independen memiliki tanggung jawab untuk melakukan supervisi atas kebijakan pengurusan, bertanggung jawab dan menyampaikan nasihat pada direksi dan bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan. Dalam penelitian Mulyani *et al.*, (2018:230) Dewan Komisaris Independen dihitung dengan:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Komisaris}}$$

### Koneksi Politik

Kemudahan yang dimiliki oleh perusahaan dalam aktivitas yang berhubungan dengan pemerintahan sehingga koneksi politik akan memberikan suatu keuntungan karena sebagian besar kepentingan mereka dipermudah. Untuk mengukur koneksi politik menggunakan variabel *dummy* jika 0 (nol) menyatakan bahwa dalam direksi perusahaan tidak ada koneksi politik, sementara 1 (satu) menyatakan adanya koneksi politik di dewan komisaris independen, serta komite audit (Butje dan Tjondro, 2014).

## Teknik Analisis Data

### Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan interpretasi dari data mean, standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Berdasarkan Sugiyono (2017), statistik deskriptif ialah metode analisis data yang kemudian dideskripsikan untuk memberikan gambaran terhadap sampel atau populasi yang diteliti.

### Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan linear antara 2 atau lebih variabel independen serta variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mendapati dampak variabel independen, yaitu *good corporate governance* dan koneksi politik bagi variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1 K_i + \beta_2 K_a + \beta_3 D_k + \beta_4 K_p + e$$

**Keterangan:**

- CETR : *Tax Avoidance* (yang dihitung menggunakan *cash effective tax rate*)  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta$  : Koefisien variabel bebas  
Ki : Kepemilikan Institusi  
Ka : Komite Audit  
Dk : Dewan Komisaris Independen  
Kp : Koneksi Politik  
e : Standarterror

**Uji Normalitas**

Uji normalitas artinya sebuah pengujian yang dilakukan untuk menghitung sebaran data dalam satu variabel untuk mengetahui apakah penyebaran data itu beredar normal atau abnormal. Dalam program SPSS uji normalitas data diuji menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Menurut Santoso (2010) pedoman mengambil keputusan dilakukan sesuai probabilitas (*asymotic significance*, yaitu: (a) Jika probabilitas > 0,05 artinya distribusi dari model regresi ialah normal. (b) Jika probabilitas < 0,05 artinya distribusi dari model regresi ialah abnormal.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan dengan tujuan untuk menguji adanya hubungan pada contoh variabel bebas pada model regresi, karena contoh regresi yang baik di dalamnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013). Hubungan yang besar antar variabel dapat diketahui melalui nilai toleransi serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat korelasi diantara variabel, jika VIF > 10 maka terdapat korelasi diantara variabel.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji apakah terdapat variasi varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan berbeda. Jika varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain permanen, maka diklaim homoskedastisitas, tetapi jika terdapat perbedaan maka artinya heteroskedastisitas. Pengujian ini dapat dilakukan menggunakan Uji *Glesjer*, yaitu absolut nilai residual diregresi sebagai variabel dependen dengan variabel independen. Menurut Santoso (2010) heteroskedastisitas dapat dideteksi apabila: (a) Nilai probabilitas > 0,05 yaitu bebas dari heteroskedastisitas. (b) Nilai probabilitas < 0,05 yaitu ada heteroskedastisitas.

**Uji Autokorelasi**

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui adanya hubungan antara residual dalam serangkaian observasi tertentu dalam suatu periode tertentu. Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji *Durbin Watson*. Menurut Ghozali (2013) Apabila  $4-dl < d < dl$  maka terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi. Jika  $du < d < 4-du$  maka model regresi tidak terdapat autokorelasi.

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Pengujian ini bertujuan untuk menghitung ukuran sampel saat membuktikan keragaman variabel dependen. Nilai koefisien determinasi artinya antara nol dan satu. Menurut Ghozali (2013), nilai  $R^2$  yang kecil adalah keterbatasan ukuran variabel - variabel independen dalam menyebutkan variasi variabel dependen. Jika nilai mendekati satu artinya variabel - variabel independen dikatakan memberikan hampir seluruh informasi yang diharapkan untuk memprediksi variabel dependen.

## Uji F

Penggunaan uji kelayakan contoh atau uji F berfungsi untuk menguji apakah fungsi regresi sampel telah signifikan atau tidak signifikan. Menurut Ghozali (2013) Uji F berguna untuk menguji apakah sebuah variabel bebas yang ada memiliki dampak secara simultan serta signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. Hipotesis pada penelitian ini dirumuskan menjadi berikut: (a) Jika probabilitas  $< \alpha = 5\%$  maka antara variabel bebas & variabel terikat ada pengaruh signifikan. (b) Jika probabilitas  $> \alpha = 5\%$  maka antara variabel bebas & variabel terikat tidak punya pengaruh signifikan.

## Uji Statistik t

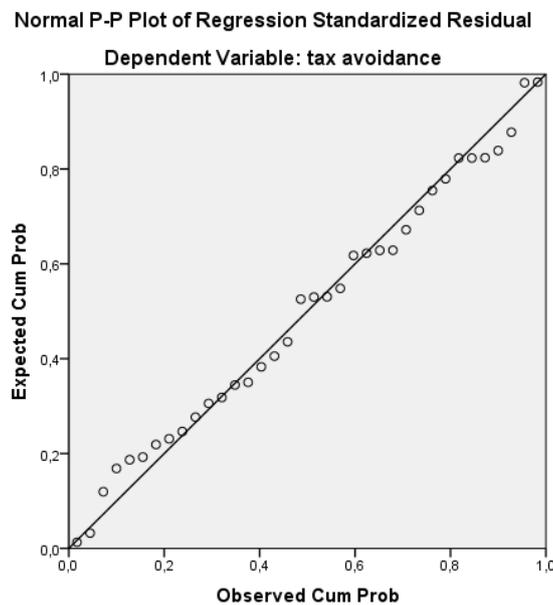
Menurut Ghozali (2013) uji statistik t berfungsi untuk menguji dampak setiap variabel bebas bagi variabel terikat. Uji t tersebut dapat dilakukan dengan cara: (a) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  hipotesis ditolak (koefisien regresi tak signifikan). (b) Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Hasil dari uji normalitas menggunakan *normal probability plot* dapat dilihat di Gambar 2 sebagai berikut:



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Normalitas data dengan pendekatan**  
**Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2021**

Hasil dari *normal probability plot* dapat terlihat jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan menelusuri arah garis diagonal. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan jika data tersebar normal serta model regresi sama dengan asumsi uji normalitas. Hasil ini diperkaya dengan uji *one-sample kolmogorov-smirnov* yang dituangkan dalam Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,01941583
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,063
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,423
Asymp. Sig. (2-tailed)		,994
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data Sekunder diolah, Tahun 2021

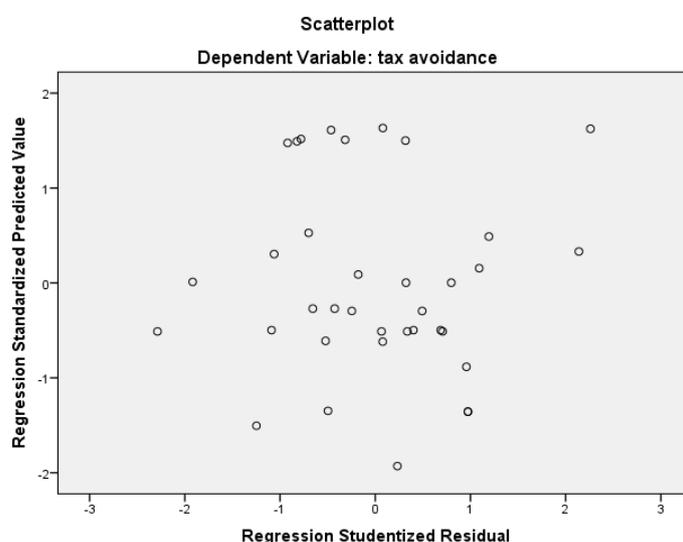
Hasil dari uji normalitas menggunakan uji *kolmogrov-smirnov* (K-S) ialah nilai signifikansi residual sebesar 0.994 artinya hasil > 0.05, maka hasilnya jika variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah terdistribusi dengan normal dan sudah terpenuhi kondisi uji normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Hasil dari uji multikolinearitas dengan melihat *tolerance* serta *VIF* pada contoh regresi linier jika nilai *tolerance* dari keempat variabel independen itu adalah > dari 0.1 yaitu sebesar 0.923 untuk variabel kepemilikan institusional, 0.917 untuk variabel dewan komisaris, 0.931 untuk variabel komite audit dan 0,971 untuk variabel koneksi politik. Namun untuk nilai *Variance Inflation Factor* atau *VIF* ketiga variabel independen lebih kecil dari 10 yaitu 1,083 untuk variabel kepemilikan institusional, 1,090 untuk variabel dewan komisaris, 1,074 untuk variabel komite audit dan 1,030 untuk variabel koneksi politik. maka memperlihatkan jika model regresi tidak ada multikolinieritas karena tidak ada hubungan bagi variabel ukuran perusahaan, likuiditas dan profitabilitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance* pada contoh regresi dari residual dalam pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Hasil pengujian heteroskedastisitas dilampirkan di Gambar 3.



**Gambar 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
Sumber: Data Sekunder diolah, tahun 2021

Analisis grafik digunakan untuk menguji hasil dari heteroskedastisitas yang melihatkan jika *plot* menyebar secara bebas diatas atau di bawah angka 0 di garis *regression studentized residual*. Maka dari itu dapat disimpulkan jika contoh regresi pada penelitian ini tidak ada gejala heteroskedastisitas dan dibuktikan pada Tabel 2 bahwa penelitian tersebut bebas heteroskedastisitas melalui Uji Glejser.

**Tabel 2**  
**Uji Heteroskedastisitas dengan pendekatan Glejser**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-,003	,024		-,128	,899
	kepemilikan institusional	,028	,026	,195	1,069	,293
	dewan komisaris	-,022	,030	-,137	-,751	,458
	komite audit	,003	,008	,073	,402	,691
	koneksi politik	-,001	,005	-,056	-,317	,753

a. Dependent Variable: abs

Sumber: Data Sekunder Diolah, Tahun 2021

Hasil uji heteroskedastisitas pada pendekatan Glejser menyatakan bahwa penelitian tersebut dinyatakan bebas heteroskedastisitas karena nilai signifikan di tiap uji  $> 0,05$  maka secara tak langsung dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

### Uji Autokorelasi

Pengujian ini digunakan untuk memberi informasi apakah terdapat hubungan dalam residual pada serangkaian penelitian di tahap tertentu. Contoh regresi disebut tidak terdapat masalah autokorelasi apabila nilai *Durbin-Watson* ada disela-sela batas  $dU$  hingga  $4-dU$ . Setelah diuji dengan menggunakan program SPSS 23 diperoleh hasil uji autokorelasi diketahui jika nilai *Durbin-Watson* ialah 2,077. Nilai *Durbin-Watson* dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi, karena nilai DW ada ditengah -2 hingga +2. Sehingga disimpulkan jika model regresi layak untuk digunakan.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mencari tautan antara variabel independen pada variabel dependen. Hasil uji regresi ialah berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B		Beta			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,072	,040		1,778	,085
	kepemilikan institusional	,149	,044	,467	3,399	,002
	dewan komisaris	,154	,050	,421	3,055	,005
	komite audit	-,007	,013	-,074	-,538	,594
	koneksi politik	,014	,008	,237	1,770	,087

a. Dependent Variable: tax avoidance

Sumber: Data Sekunder diolah, Tahun 2021

Hasil penelitian menggunakan uji regresi linear berganda yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta_1Ki + \beta_2Ka + \beta_3Dk + \beta_4Kp + e$$

$$CETR = 0,072 + 0,149Ki + -0,007 Ka + 0,154Dk + + 0,014 Kp + e$$

Bahwa nilai konstanta sebesar 0,072 dan bernilai positif yang memperlihatkan jika variabel independen yang terdiri dari *tax avoidance* sama dengan 0, maka variabel dependen *tax avoidance* ialah 0,072. Nilai koefisien *Kepemilikan institusional* memiliki nilai sebesar 0,149 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa *kepemilikan institusional* mempunyai hubungan searah dengan *tax avoidance*. Pada nilai koefisien dewan komisaris memiliki nilai 0,154 dan bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa *dewan komisaris* memiliki hubungan searah dengan *tax avoidance*. Komite audit memiliki nilai -0,007 dan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa *komite audit* memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan *tax avoidance*. Nilai koefisien *Koneksi politik* memiliki nilai 0,014 dan bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa *koneksi politik* memiliki hubungan searah dengan *tax avoidance*.

### Uji Koefisien Determinasi (R)<sup>2</sup>

Hasil uji (R)<sup>2</sup> menyatakan jika dalam penelitian ini bahwa nilai *R square* memiliki nilai sebesar 0,461 atau 46,1 yang dimana nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel *tax avoidance* tersebut disebabkan dari variabel koneksi politik, komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris 46,1% dan sisanya 53,9% disebabkan oleh penyebab lainnya diluar variabel yang digunakan.

### Uji F

Hasil uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat di contoh regresi ini dapat diteliti pada variabel dependen. Setelah diuji dengan menggunakan program SPSS 23, maka hasil dari uji F ialah dengan membandingkan nilai probabilitas dengan  $\alpha$  yang ditentukan, memperlihatkan jika nilai uji F sebesar 6,621 dengan tingkat signifikan ialah 0.001 yang berarti  $< 0.05$ , jadi dapat disimpulkan jika kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dari pengujian tersebut contoh regresi di penelitian ini dinyatakan layak dan dapat diteruskan ke tingkat selanjutnya.

### Uji t

Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi dengan cara individual. Hasil Uji-t dengan tingkat signifikan ialah  $\alpha = 0.05$  (5%) disebutkan di Tabel 4.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Secara Parsial (uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
(Constant)	,072	,040		1,778	,085
1					
kepemilikan institusional	,149	,044	,467	3,399	,002
dewan komisaris	,154	,050	,421	3,055	,005
komite audit	-,007	,013	-,074	-,538	,594
koneksi politik	,014	,008	,237	1,770	,087

a. Dependent Variable: *tax avoidance*

Sumber: Data Sekunder diolah, tahun 2021

Dari hasil pengujian secara parsial pada Tabel 4, maka dapat disimpulkan yaitu: (1) hasil uji secara parsial dampak kepemilikan institusional kepada tindakan *tax avoidance* bagi pengujian statistik t, variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai beta ialah 0,149 dengan tingkat signifikansi ialah 0,002. (2) Uji t memperlihatkan jika nilai signifikan kepemilikan institusional ialah sebesar 0.002 yang artinya  $< 0.05$ . Sehingga dapat disimpulkan jika kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 - 2020. (3) Pengujian hipotesis komite audit terhadap *tax avoidance* melalui hasil uji dengan parsial (uji t) memperlihatkan jika nilai signifikan komite audit ialah 0.594 maka  $> 0.05$ . Jadi dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2020. (4) Pengujian dewan komisaris terhadap *tax avoidance* dengan hasil uji secara parsial (uji t) memperlihatkan jika nilai signifikan dewan komisaris ialah ialah 0.005 yaitu  $< 0.05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima, sehingga terdapat pengaruh dari dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2020. (5) Pengujian hipotesis koneksi politik terhadap *tax avoidance* melalui hasil uji secara parsial (uji t) memperlihatkan jika nilai signifikan koneksi politik ialah 0.087 yang berarti  $> 0.05$ . Maka koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 - 2020, dengan begitu maka  $H_4$  ditolak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance***

menurut uji pengujian dengan parsial memperlihatkan jika kepemilikan institusional terdapat pengaruh positif berdasarkan hasil pengujian nilai signifikan 0,002 atau  $< 0,05$ . Kepemilikan sejumlah saham oleh institusi ialah pengertian dari kepemilikan institusional, variabel tersebut diukur dengan menggunakan presentase (Nabela, 2012). Sesuai dengan *Agency Theory*, kepemilikan saham dalam suatu perusahaan terkadang menimbulkan konflik antara manajemen dan pemegang saham, karena manajer harus bertindak untuk memutuskan berkaitan tentang operasional perusahaan, namun harus tetap bertindak sejalan dengan kepentingan para pemegang saham. Dengan besarnya komposisi saham oleh institusi di dalam suatu perusahaan, membuat *shareholder* memiliki kendali yang lebih tinggi terhadap perusahaan. Para *shareholder* berupaya untuk memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan. Untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan maka praktik *tax avoidance* merupakan cara yang digunakan sehingga laba perusahaan masih bisa didapatkan sesuai dengan target dari *shareholder*. Maka dapat disimpulkan jika kepemilikan insitusional terdapat pengaruh positif terhadap penerapan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Pramuka (2018) yang menyatakan bahwa untuk mencapai keuntungan yang ditargetkan oleh perusahaan, serta untuk mengurangi *agency problem* maka praktik penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan.

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Hasil uji secara parsial memperlihatkan jika komite audit mendapatkan hasil tidak signifikan melalui uji statistik berdasarkan nilai probabilitas 0,594 atau  $> 0,05$ . Maka dapat disimpulkan jika komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Komite audit disusun untuk membantu dewan komisaris saat menjalankan kewajiban dan fungsinya. Dalam sebuah perusahaan harus mempunyai jumlah paling sedikit tiga orang anggota komite audit, namun jumlah tersebut tidak berdampak untuk tindakan penghindaran pajak karena minimnya pengawasan terhadap kinerja operasional perusahaan. Selain itu, tugas dari komite audit yang hanya sebatas melakukan audit eksternal dan melakukan review terhadap laporan

keuangan, menyebabkan review laporan keuangan yang dilakukan tidak mendalam. Sehingga keberadaan komite audit dianggap kurang berperan aktif dalam kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan.

Berdasarkan pengujian hipotesis di atas, dapat disimpulkan jika penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh variabel komite audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukartha dan Singly (2015) yang menyebutkan komite audit diwajibkan untuk mengontrol dan menolong dewan komisaris yang dituntut oleh manajemen untuk membuat informasi yang baik dan dapat melakukan kontrol untuk mengurangi adanya konflik pendapat di dalam perusahaan salah satunya adalah penghindaran pajak atau disebut dengan *tax avoidance*. Hasil pengujian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Hidayati dan Fidiana (2017) yang menghasilkan jika komite audit tidak ikut serta untuk penetapan kebijakan beban pajak yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

### **Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance***

Pengujian secara parsial memperlihatkan jika dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan melalui nilai signifikansi yaitu  $0,005 < 0,05$ . Dari hasil pengujian tersebut diketahui jika adanya komisaris independen efektif untuk langkah preventif praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan internal manajemen dapat dilakukan dengan baik, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dengan baik dan menghindari penyimpangan dana perusahaan, sehingga praktik *tax avoidance* semakin rendah kemungkinannya untuk terjadi (Tarmidi *et al.*, 2020).

Pengawasan terhadap kinerja manajemen akan semakin tinggi jika komposisi dewan komisaris semakin banyak. Pengawasan yang maksimal oleh komisaris independen ini akan meminimalisir konflik, maka manajemen yang memiliki rencana untuk melakukan kecurangan penghindaran pajak dapat memaksimalkan imbalan yang diterima sehingga dapat bersikap transparan untuk melakukan operasional perusahaan sehingga *tax avoidance* dapat dihindari. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.33/POJK.04/2014 dewan komisaris harus dimiliki lebih dari 2 (dua) orang dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen minimal 33% (tiga puluh tiga persen) dari proporsi anggota dewan komisaris dan salah satunya dinaikkan sebagai komisaris utama atau presiden komisaris. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) yang menghasilkan adanya pengaruh negatif dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance***

Hasil pengujian secara parsial memperlihatkan jika Koneksi Politik berhubungan positif dan tidak signifikan secara statistik berdasarkan nilai probabilitas 0,087 atau  $> 0,05$ . Hasil ini memberikan arti jika tidak adanya pengaruh dari koneksi politik pada *tax avoidance*. Hasil penelitian ini memperlihatkan walaupun terdapat koneksi politik di perusahaan dalam struktur pemegang saham utama, atau struktur organisasi lainnya seperti di dalam dewan komisaris, komite audit dan dewan direksi yang mempunyai posisi atau fungsi penting di pemerintahan atau partai politik, namun fasilitas itu tidak digunakan perusahaan untuk mengaplikasikan tindakan *tax avoidance*.

Kualitas perusahaan harus dijaga apabila mempunyai hubungan dengan pemerintah atau partai politik. Karena reputasi perusahaan yang mempunyai hubungan politik lebih dipercaya masyarakat. Hal itu yang membuat perusahaan dengan koneksi politik memilih selektif sebelum mengambil kebijakan atau keputusan perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulansari dan Mildawati (2018) yang menyampaikan bahwa koneksi politik yang terdapat di perusahaan akan membuat perusahaan lebih tertib dalam tindakan perpajakannya. Selaras melalui Peraturan menteri keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 yang

menyebutkan bahwa perusahaan jika sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah dikategorikan sebagai wajib pajak dengan risiko rendah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini berfungsi untuk menilai pengaruh *good corporate governance* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* di perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2020. Menurut hasil dari pengujian, maka diperoleh kesimpulan: (1) Pertama, adanya pengaruh positif kepemilikan institusi bagi praktik *tax avoidance*. Hal ini artinya jika semakin tinggi kepemilikan institusional yang ada di perusahaan maka semakin tinggi keinginan untuk memperoleh laba untuk kesejahteraan pribadi. Penelitian ini menghasilkan jika kepemilikan institusional berpengaruh bagi pelaksanaan *tax avoidance*. Karena para pemegang saham cenderung ingin memaksimalkan laba perusahaan sehingga praktik penghindaran pajak cenderung dilakukan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan jika kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 - 2020. (2) Kedua, tidak adanya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Ini disebabkan karena banyak atau sedikitnya proporsi komite audit tak memberikan jaminan bahwa komite audit dapat ikut serta dalam memberikan kebijakan mengenai perpajakan kepada perusahaan. Komite audit hanya berperan untuk melakukan review laporan dan seleksi laporan tanpa menganalisis pengendalian dalam perusahaan. Maka dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2020. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan *tax avoidance* tidak berpengaruh dengan adanya komite audit, proporsi komite audit tidak mempengaruhi pelaksanaan *tax avoidance* karena tugas komite audit sebatas melakukan review terhadap laporan. (3) Ketiga, adanya pengaruh negatif dewan komisaris independen bagi *tax avoidance*. Perihal ini karena adanya faktor independen dewan komisaris dapat mempengaruhi untuk menghindari perlakuan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat pengaruh signifikan dari dewan komisaris terhadap *tax avoidance*, semakin banyak proporsi dewan komisaris maka pengawasan dan pengendalian internal perusahaan akan semakin tinggi, sehingga praktik penghindaran pajak cenderung dapat dihindari. (4) Keempat, tidak adanya pengaruh dari koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan jika meskipun perusahaan terdapat koneksi politik yang terlihat dari investor utama atau dewan komisaris, maka hal itu tidak digunakan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Adanya pengaruh tidak signifikan bagi koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang menyimpulkan jika perusahaan yang memiliki koneksi politik mengindikasikan bahwa adanya koneksi politik tersebut maka perusahaan dipercaya menjadi wajib pajak patuh yang tidak akan mempraktikkan perlakuan penghindaran pajak.

### Saran

Menurut simpulan yang sudah dijelaskan diatas, gagasan yang dapat diberikan ialah agar peneliti berikutnya memperluas sampel penelitian keseluruhan perusahaan di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat melihat secara luas pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*, serta menggunakan variabel lain dalam *Good Corporate Governance* seperti kualitas audit. Selain itu diharapkan pengambilan sektor penelitian tidak hanya melalui sektor makanan dan minuman, melainkan dapat melakukan penelitian melalui sektor lain yang lebih kompleks. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel selain *good corporate governance* untuk dapat meneliti bagaimana penerapan *tax avoidance* di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga diharapkan

untuk memiliki rentang waktu yang lama sehingga dapat mengetahui *tax avoidance* yang dipraktikkan perusahaan dalam waktu yang lama dan diharapkan dapat menambah variabel lain selain variabel yang sudah digunakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A., dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal akuntansi dan Auditing*, 8(2): 123-136.
- Butje, S., dan E. Tjondro. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2): 1-20
- Claessens, S. 2006. Corporate governance and development. *The World bank research observer*, 21(1): 91-122.
- Diantari, P. R. dan I. G. K. A. Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(1): 702-732.
- Eksandy, A. 2017. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1): 1-20.
- Fajri, A. 2018. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *E- Jurnal Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. 8(2): 60-71
- Feranika, A. 2014. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, (2): 31-39.
- Fidiana, F. dan N. Hidayati. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).
- Ghozali, I. 2013. *Analisis Multivariate Program*. Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Lestari, G. A. W., dan I.A. Putri. 2017. Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3): 2028-2054.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi 1. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyani, S., A. Wijayanti dan E. Masitoh. 2018. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1): 10-24
- Murniyana, G. W. 2018. Pengaruh Koneksi Politik, Harga Transfer, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2015-2017). *Dspace Repository*.
- Nabela, Y. 2012. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia. *Doctoral Dissertation*, Universitas Negeri Padang.
- Prasetyo, I., dan B. A. Pramuka. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2): 1-13
- Purwanti, S. M., dan L. Sugiyarti. 2017. Pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap tax avoidance (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3): 1625-1642.

- Ramadona, A., A.R Tanjung, dan R. Rusli. 2016. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *Disertasi*. Universitas Riau.
- Safii, H. M., dan S. Suyanto. 2019. Pengaruh Koneksi Politik dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2017. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 10(4).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tarmidi, D., Sari, P. N., dan Handayani, R. 2020. Tax Avoidance: Impact of Financial and Non-Financial Factors. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(2): 1-8.
- Walfarianto. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Leutikaprio. Yogyakarta.
- Wibawa, A., dan Abdillah, Y. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa Sri Kehati Tahun 2010-2014). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 11(1): 1-13.
- Wulansari, S., dan T. Mildawati. 2018. Pengaruh Corporate Governance dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(9): 80-92.